



B

Prosiding Seminar Nasional

MEMBINGKAI KEBHINEKAAN DI BUMI NUSANTARA

Pembicara Utama:

Prof. Dr. M. I. Djoko Marihandono
(Universitas Indonesia)

Dr. Y. Argo Twikromo, MA
(Universitas Atma Jaya dan UGM Yogyakarta)

Dr. Phil. Suratno, MA
(Universitas Paramadina)

Kerjasama
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Utara dan
Laboratorium Fispol Unsrat
Hotel Aryaduta dan Fispol Unsrat, 26- 29 April 2017

Prosiding Seminar Nasional

MEMBINGKAI KEBHINEKAAN DI BUMI NUSANTARA

Manado, 26 – 29 April 2017



BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MANADO

Bekerjasama

LABORATORIUM FISPOL UNSRAT MANADO

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Membangkitkan Kebhinekaan di Bumi Nusantara
Manado, 26 – 29 April 2017

Penanggungjawab :

Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc, DEA (Rektor Unsrat)
Drs. Rusli Manorek (Kepala BPNB Manado)
Dr. Drs. Novie R. Pioh, M.Si (Dekan Fispol Unsrat)
Dr. Drs. Michael Mamentu, MA (Ka. Laboratorium Fispol Unsrat)

Pembicara Utama :

Dr. Hilmar Farid Setiadi (Direktur Jenderal Kebudayaan RI)
Prof. Dr. M.J. Djoko Marhandono (Universitas Indonesia)
Dr. Y. Argo Iwikromo, MA (Univ. Atmajaya dan Univ. Gadjah Mada Yogyakarta)
Dr. Phil. Suratno, MA (Universitas Paramadina)

Tim Kerja :

Budi Kristanto
Salmin Djakaria
Lily E.N. Saud
Joyly R.R. Rawis
Magrita S. Tilaar
Trisna Rafni Oroh
Muh Nur Ichsan A.
Nono S.A. Sumampouw

Sekretariat :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
Jl. Katamso Kel. Bumi Beringin LK. V Manado - 95113
Telp/Fax. 0431 - 864926

Diterbitkan oleh :

Penerbit Kepel Press
Puri Arsita, Jl. Kalimantan, Purwosari, Ring Road Utara, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274 - 884500, HP : 081222710912
Email : amara_books@yahoo.com

Untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-6525-31-4

Alamat Korespondensi :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
Jl. Katamso Kel. Bumi Beringin LK. V Manado - 95113
Telp/Fax. 0431 - 864926
Pos-El : bpsntmanado@yahoo.com ; budi2bpsntmanado@gmail.com

PENGANTAR TIM KERJA SEMINAR NASIONAL MEMBINGKAI KEBHINEKAAN DI BUMI NUSANTARA

Prosiding ini disusun berdasarkan hasil Seminar Nasional yang bertemakan Membingkai Kebhinekaan di Bumi Nusantara. Kegiatan seminar tersebut telah dilaksanakan pada Tanggal 26 – 29 April 2017 di Hotel Aryaduta dan Aula Fispol Universitas Sam Ratulangi Manado. Penyelenggaraan seminar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran BPNB bersama stake holdersnya dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Bumi Nusantara.

Kegiatan seminar Nasional ini dilaksanakan bekerjasama antara Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara dengan Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Kegiatan diikuti kurang lebih 80 peserta yang terdiri atas Birokrat, Akademisi, Peneliti, Penggiat dan Pelestari Kebudayaan serta mahasiswa.

Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada Dirjen Kebudayaan RI Bapak Dr. Hilmar Farid Setiadi, Rektor Universitas Sam Ratulangi Ibu Prof. Dr. Ir. Ellen J. Kumaat, M.Sc. DEA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsrat, Dr. Drs. Novie R. Pioh, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unsrat, Drs. Jerry S. Ulaen, M.Si dan Kepala Laboratorium Fispol Unsrat, Dr. Drs. Michael Mamentu, MA yang telah memberikan arahan, pandangan, dan dukungan dalam pelaksanaan seminar nasional ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembicara utama teristimewa kepada Prof. Dr. M.I. Djoko Marihandono, Dr. Y. Argo Twikromo, MA dan Dr. Suratno, MA atas pengetahuan yang telah dibagikan kepada kami.

Selanjutnya kepada para pemakalah dan editor serta pelaksana seminar Nasional ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas jerih payahnya sehingga seminar dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini.

Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat khususnya dalam upaya pelestarian kebudayaan yang ada di wilayah Nusantara.

Manado, Medio April 2017

Tim Kerja Seminar Nasional,

Budi Kristanto

Salmin Djakaria

Lily E.N. Saud

Joyly R.R. Rawis

Magrita S. Tilaar

Muh. Nur Ichsan. A.

Trisna Rafny Oroh

Stevano Sumampouw

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Tim Kerja Seminar Nasional</i>	iii
<i>"Membingkai Kebhinekaan di Bumi Nusantara"</i>	iii
<i>Sambutan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara</i>	v
<i>Daftar Isi</i>	vii
Makalah Utama :	
<i>Urgensi Dukungan Kekuatan dan Kekuasaan Laut di Nusantara Demi Mendukung Kebhinekaan di Bumi Nusantara</i> Oleh Prof. Dr. M.I. Djoko Marihandono (Universitas Indonesia)	1
<i>Politik Multikulturalisme Pengaruhnya Pada (Dis)-Integrasi Bangsa</i> Oleh Dr. Phil. Suratno, MA (Universitas Paramadina)	11
<i>Merajut Mimpi Bersama Kebhinekaan dalam Bingkai Kekharmonisan</i> Oleh Dr. Y. Argo Twikromo, MA (Universitas Atmajaya dan UGM Yogya)	23
Makalah Pendamping :	
Panel Klabat	
<i>Diskursus Islam dan Karakter Politik Negara di Pulau Sumbawa pada Abad ke-17</i> Oleh Muslimin A.R. Effendy (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulsel)	28
<i>Dari "Landstreek Van Manado" ke "Otonomi Daerah": Teritorialisasi dan Identifikasi Diri</i> Oleh Alex J. Ulaen (Marin CrC Manado)	41
<i>Bhineka Tunggal Ika dalam Perspektif Linguistik</i> Oleh Ari Wulandari (PhD Candidate Universitas Gadjah Mada)	51
<i>Pengetahuan Lokal dan Pengelolaan Sumberdaya Laut: Etnografi Komunitas Nelayan di Tomalou, Tidore Kepulauan, Maluku Utara</i> Oleh Andi Sumar-Karman (Universitas Sultan Khairun Ternate)	62
<i>Ethnicity and Economic Mobility in Eastern Indonesia</i> Oleh Basri Amin (Universitas Negeri Gorontalo)	81
<i>Pemertahanan Budaya Dalam Memperkuat Jatidiri Keindonesiaan Wilayah Perbatasan Antar Negara di Sulawesi Utara</i>	94
Oleh Jerry S. Ulaen (Universitas Sam Ratulangi)	94
<i>Peran Wanita Dalam Pembentukan Karakter Bangsa : Amatan atas Keseharian di Kampung Jawa-Tondano</i> Oleh Salmin Djakarria (Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado).....	102

<i>Berdarah Jawa Berbunyi Tondano</i> Oleh Stefanie Humena (Pemerhati Budaya Sulawesi Utara).....	449
<i>Konteks Sosial dan Primordialisme: Kasus Minahasa Utara</i> Oleh Maria Heny Pratiknjo	461
<i>Aspek-aspek Nilai dalam Program Pemberdayaan Nelayan Kecil di kota Manado dan Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus Kegagalan Program Pemberdayaan Nelayan di Manado dan Kepulauan Talaud)</i> Oleh Michael Mamentu (Kepala Lab. FISPOL Unsrat Manado).....	467
<i>Abstrak Pendukung</i> <i>Harmony in the Midst of Conflict and Trauma: Ethnography of Religious Tolerance in Batusitanduk, South Sulawesi (1950 - 1998)</i> Oleh Taufik M. (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulsel)	476
<i>Implementasi Aturan Adat terhadap Pengelolaan Lingkungan ; Dampaknya terhadap perubahan sosial pada Komunitas Adat Kasepuhan Cisitu</i> Oleh Risa Nopianti (Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat).....	478
<i>Literature of The Archipelago: Diversity Transformed</i> Oleh Reiner Emyot Ointoe (Yayasan Serat Manado).....	479

KONTEKS SOSIAL DAN PRIMORDIALISME: KASUS MINAHASA UTARA*Maria Heny Pratikno***ABSTRAK**

Masyarakat multikultur Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak NKRI terbentuk, tetapi pada masa Orde Baru, keadaan tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme bangsa Indonesia kemudian diberi penekanan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Inti dari cita-cita masyarakat multikultural tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" kehidupan yang bercorak masyarakat majemuk (*plural society*) sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat multikultural, isu primordialisme menjadi tantangan penting yang terus menerus dihadapi dalam konteks sosial yang spesifik. Artikel ini membahas hubungan antara primordialisme dan konteks sosial pada masyarakat multikultur dengan mengambil studi kasus di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Primordialisme, Multikultur, Minahasa Utara

PENDAHULUAN

Dalam perspektif politik memandang bahwasanya Indonesia dibangun atas dasar perjuangan para pahlawan pendahulu dengan semboyan bangsa Bhineka Tunggal Ika yakni walaupun berbeda tapi satu. Dilihat dari aspek sosial budaya dapat dilihat bahwasanya corak Masyarakat yang berbeda-beda suku dan kebudayaan seperti tersebut diatas disebut masyarakat multikultural, yakni sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu wilayah tertentu, masing-masing mempunyai sistem nilai berbagai kesatuan yang menjadi bagian-bagiannya, sehingga para anggota masyarakat secara keseluruhan kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Model keanekaragaman seperti ini seharusnya merupakan modal dasar bagi masyarakat Indonesia karena disatukan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'. Kenyataan sehari-hari dalam melaksanakan amanat undang-undang, negara sebenarnya menekankan adanya keceragaman budaya dan sama sekali tidak menghiraukan prinsip-prinsip *pluralitas*, sehingga banyak memicu munculnya berbagai masalah yang baru. Akar permasalahan ini terletak pada ketidaksungguhan para pelaksana dalam rangka mengimplementasikannya. Adapun penyebab yang paling utama adalah semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' masih merupakan cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada kenyataan yang benar-benar hidup di masyarakat.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, akan tetapi, pada masa Orde Baru, keadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme bangsa Indonesia kemudian diberi penekanan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalah artikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada juga yang

mempersoalkan masalah asli atau tidak. Akan Multikultural baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik praktek penerapan demokrasi yang hanya berlakukan pada kelompok tertentu (pejabat dan kerabatnya). Wacana demokrasi itu ternyata bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun Orde Baru.

Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" kehidupan orde baru yang bercorak masyarakat majemuk (*plural society*) sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Adapun acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, masyarakat dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Lebih jauh harus diakui bahwasanya potensi-potensi budaya yang dimiliki harus dilihat sebagai asset Negara yang harus didayagunakan bagi pembangunan bangsa ke depan. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya

Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pemberdayaan yang lebih baik. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan perlu dikembangkan seluas-luasnya agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa serta secara otomatis memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, misi utamanya adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai asset dan sumber kekuatan bangsa serta menjadikannya suatu sinergi nasional.

Akan tetapi, walaupun masyarakat multikultur telah memiliki seperangkat tata nilai yang dianggap sebagai moralitas bersama, hal ini sama sekali tidak menjamin bahwa masyarakat tersebut akan selalu hidup dalam keadaan damai. Seringkali upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan politis menghasilkan konflik politik yang lebih besar intensitasnya, namun upaya-upaya politis tersebut seharusnya tidak pernah boleh menyangkal hak-hak individual seorang pun, terutama atas dasar alasan-alasan perbedaan etnis dan agama.

SIKAP-SIKAP PRIMORDIAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Akhir-akhir ini, intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat kian meningkat, terutama konflik sosial yang bersifat horizontal yakni konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara. Beberapa fenomena yang merebak yang nota bene melibatkan institusi penegak hukum antara lain kasus SARA dan isu penistaan agama serta pemaksaan kehendak oleh kelompok mayoritas yang ekstrim.

Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah. Karena masyarakat tidak selamanya bebas konflik. Hanya saja, persoalannya menjadi lain jika konflik

sosial yang berkembang di masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis.

Kasus kerusuhan Ambon, Poso, Maluku, GAM di Aceh, kasus Ketapang antara orang Dayak dan Madura, kasus Jakarta tahun 2008 yang mengorbankan banyak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Akhir-akhir ini mulai merebak kasus-kasus kekerasan dengan motif terorisme, kerusuhan antara kampung di Jakarta Selatan yang menelan korban jiwa. Kasus kerusuhan massa terbuka antar etnis di Jakarta Selat, Penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Banten, kerusuhan dan pembakaran rumah ibadah di Temanggung, bom bunuh diri di Solo, mengangkat issue agama dalam pemenangan pilkada dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan berbahaya. Konflik sosial berbau SARA (agama) ini tidak boleh dianggap remeh dan harus segera diatasi secara mendasar dan proporsional agar tidak menciptakan disintegrasi nasional. Banyak hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik tersebut. Apakah fenomena konflik ini merupakan peristiwa *incidental* dengan motif tertentu dan kepentingan sesaat, ataukah justru merupakan budaya dalam masyarakat yang bersifat laten. Realitas empiris ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada problem mendasar yang belum terselesaikan menyangkut penghayatan kita terhadap agama sebagai kumpulan doktrin di satu pihak dan sikap keagamaan yang terwujud dalam perilaku kebudayaan di pihak lain. Kemajemukan masyarakat lokal seperti itu bukan saja bersifat horizontal (perbedaan etnik, agama dan sebagainya), tetapi juga sering berkecenderungan vertikal, yaitu terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau pekerjaan yang diraihinya. Dalam hal yang pertama, perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok masyarakat, khususnya dari etnis tertentu yang memiliki tradisi dagang, naik peringkatnya dan menimbulkan kecemburuan sosial oleh masyarakat setempat yang mandeg perkembangannya. Dalam hal kedua, kelompok masyarakat etnis dan agama tertentu, yang semula berada di luar *mainstream*. Hal ini dapat menimbulkan gesekan primordialistik, apalagi bila ditunggangi kepentingan politik ekonomi tertentu seperti kasus-kasus kerusuhan anti etnis beberapa waktu yang lalu.

Dalam kasus lokal di Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong I dan II serta Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Sejak kurang lebih 80 tahun yang lalu datang dan menetap masyarakat beda etnis dan agama karena desakan kebutuhan ekonomi yakni untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang lebih layak, mengikuti kerabat atau kernalan, juga atas dasar ikatan perkawinan. Adapun kehadiran Orang Jawa, Bugis, Makassar, Sangihe dan Talaud, Gorontalo serta Maluku, Ambon dan lain-lain yang mayoritas beragama Islam, kecuali orang Sangihe dan Talaud rata-rata beragama Kristen dengan beberapa denominasi yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Advent dan Pantekosta.

Proses kedatangan mereka berbentuk jaringan hingga mereka bisa sampai di Airmadidi antara lain antara lain melalui jaringan kekerabatan karena ada saudara atau kernalan yang menetap dan bekerja di Manado. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari mereka mengembangkan mata pencaharian sebagai penjual Mie Bakso, Mie Ayam, Es, Gado-gado, Ketoprak, nasi kuning, Gule dan sate, membuat dan menjual Tahu dan Tempe, Tukang Sol Sepatu, Pedagang Pakaian dan kain Batik, Kerajinan Tangan kuningan, Pengrajin Peralatan Rumah Tangga, dan lain-lain. Orang Makassar mengembangkan mata pencaharian sebagai pedagang emas, pedagang pakaian jadi, usaha rumah makan dan membuka toko kelontong di pasar Airmadidi. Orang Sangihe dan Talaud bekerja di perkebunan kelapa dan pala milik warga setempat serta pekerjaan sekitar rumah tangga dan membuat dan menjual kue. Orang Gorontalo menjadi pedagang barang-barang kelontong, keperluan rumah tangga, ikan, bumbu dapur di sekitar pasar dan terminal Airmadidi. Adapun orang Maluku/Ternate keturunan China membuka usaha restaurant, onderdil motor dan mobil, toko yang relative lebih besar dan lengkap, dan pendatang lainnya berprofesi sebagai Nelayan dan pekerjaan dalam sector informal, Pekerja Bangunan dan pedagang kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan yang mereka lakoni di Airmadidi sebenarnya adalah pekerjaan baru karena rata-rata di daerah asal, mereka berprofesi sebagai petani. Pola tempat tinggal mereka di

pusat kota Airmadidi yaitu kelurahan Sarongsong I, kelurahan Sarongsong II. Dan kelurahan Airmadidi Atas. Awalnya mereka kost, sewa rumah, bahkan beberapa di antaranya numpang tinggal di rumah saudara atau kenalan.

Dalam perkembangan terjadi komunikasi dan interaksi yang intensif antara sesama penduduk pendatang dan penduduk setempat. Termasuk terjadinya perkawinan antar etnik dan agama. Beberapa masyarakat pendatang, karena keuletan dan mau bekerja keras, dapat membangun rumah termasuk juga membangun masjid serta menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Menurut pengamatan awal setelah mereka berhasil dalam kehidupan ada kecenderungan memanggil anggota kerabat yang ada di kampung halaman untuk bekerja membantu usaha dagang mereka.

Penduduk asli dapat menerima kedatangan mereka bahkan hidup bersama saling berinteraksi dilandasi oleh faktor kepentingan atau kebutuhan masing-masing yang sifatnya reksiprokal, artinya dari faktor ekonomi yakni system mata pencaharian hidup penduduk setempat memerlukan jasa penduduk pendatang dan penduduk pendatang membutuhkan upah dalam memenuhi kelangsungan hidup pribadi dan keluarga (*simbiosme mutualisme*). Dalam proses interaksi sosial masing-masing etnis mempertahankan corak perilaku budaya yang mereka anut dari tempat asal masing-masing seperti agama, bahasa, jenis makanan, bentuk interaksi serta aktivitas sosial dan budaya yang berkaitan dengan lingkaran sekitar daur hidup misalnya kelahiran, perkawinan, kematian. Sampai tahun 1992, sikap-sikap primordial sangat kental melekat dan mewarnai corak kehidupan dan interaksi sosial mereka¹.

Pada saat terjadi kerusuhan massa di Ambon, Maluku dan Poso maka banyak penduduk dari daerah rusuh tersebut di atas datang ke Manado sebagai pengungsi. Kenyataan tersebut membuat para tokoh masyarakat dan tokoh agama muslim di Kecamatan Airmadidi merasa perlu untuk membangun dialog yang lebih intensif dengan Tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masing-masing kelompok etnis setempat mereka merasa perlu meningkatkan interaksi dan silaturahmi dengan semua kelompok masyarakat yang ada di kecamatan Airmadidi. Pada akhir tahun 1999, dibuat kesepakatan dari 3 kelompok masyarakat beda agama yaitu 2 kelompok Muslim dan 1 kelompok Kristen, masing-masing mereka lebih 2 orang imam dari mesjid Istiqlal, 2 orang pimpinan jemaat Gereja Tabita, dan 2 orang imam dari mesjid Diponegoro. Lokasi mesjid dan gereja tersebut terletak di pusat kota Airmadidi yaitu kelurahan Sarongsong I (hasil pengamatan dan wawancara Desember 2010). Adapun hasil kesepakatan dari 3 kelompok masyarakat beda agama tersebut adalah Pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat melalui pemahaman yang utuh dari nilai budaya dan agama. Dibangunnya dialog antar umat beragama, bermaksud untuk mencapai kesamaan pandang dalam menyikapi issue-issue yang bernuansa SARA antara masyarakat beda etnis dan agama, dapat dirinci sebagai berikut: (1) perlu dibangun diskusi dan dialog antar masyarakat beda etnis dan agama; (2) Perlu ditingkatkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat; (3) Perlu ditingkatkan kerukunan hidup dalam kehidupan sosial

Tiga poin perjanjian di atas diformulasikan dalam komitmen dengan membentuk perkumpulan yang diberi nama ISTADI. Nama tersebut merupakan akronim yang diambil dari nama Masjid dan gereja dari penginisiatif (inisiator), jelasnya: IS, kata awal dari nama Masjid Istiqlal; TA, suku kata awal dari nama gereja Tabita; DI, suku kata awal dari nama masjid Diponegoro. Perkumpulan ini menjadi sarana interaksi dan komunikasi masing-masing kelompok etnis dalam lingkup masyarakat multikultur yang bebas konflik massa terbuka walaupun secara nyata potensi konflik itu ada, selain itu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan hidup para anggota kelompoknya.

Pada saat pengamatan dan wawancara, ditemukan data adanya suatu sikap toleransi dan tolong-menolong pada acara kematian seorang anggota perkumpulan yang beragama Kristen.

¹ Maria Heny Pratiknjo, 2009, "Pembinaan Generasi Muda Dalam Upaya Mencegah Konflik Massa Terbuka" (Materi Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado di Airmadidi 15 Agustus 2009) hal. 3

Aktivitas membangun *sabuu*² (tenda), menggali kubur dan masak-memasak dilakukan secara bersama-sama, baik oleh mereka yang beragama Kristen ataupun Islam. Pada saat pengamatan sambil lalu, penulis tidak dapat membedakan penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Nanti ketika adzan Lohor saat anggota perkumpulan beranjak untuk sholat barulah penulis dapat membedakannya.

Aspek ekonomi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan interaksi, mengacu nilai-nilai sosial budaya serta rasionalitas berpikir dari masyarakat dan merupakan indikator utama sehingga masyarakat multikultur dapat hidup berdampingan tanpa ada konflik massa terbuka walaupun sebenarnya potensi konflik itu ada. Penulis sempat melakukan wawancara sambil lalu kepada seorang ibu beragama Kristen yang berprofesi sebagai penjual kue basah di pasar Airmadidi tentang prinsip-prinsip kehidupan bersama dengan latar belakang perbedaan etnis dan agama, dengan spontan informan menjawab bahwa harus ada rasa saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Adzan subuh bagi informan tidak mengganggu kenyamanan tidur melainkan menjadi sebuah tanda bagi informan untuk segera bersiap ke pasar menjual kue.

Anggota perkumpulan ini sangat solid dalam aktivitas sosial budaya, akan tetapi pada situasi tertentu seperti PILKADA, PILEG ataupun PILPRES solidaritas anggota mengendor dan menjadi kurang kompak, karena masing-masing anggota kelompok mempunyai kepentingan untuk mengusung calon tertentu.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bentuk dan pola interaksi masyarakat multikultural dalam kehidupan keseharian mereka didasarkan pada prinsip *symbiosis mutualism*. Aksi interaksi yang dikembangkan oleh kelompok beda etnis dalam dinamika kehidupan masyarakat multikultural di Kecamatan Airmadidi mengedepankan toleransi dan cara berpikir yang rasional. Sikap-sikap primordial masyarakat pendatang tetap dipertahankan al. agama, kebiasaan makan, bahasa dan dapat diterima serta dihargai oleh masyarakat penduduk asli. Pada sisi yang bersamaan, dalam mengelola masyarakat multikultural yang dinamis, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dari berbagai denominasi memegang peranan yang penting, mereka membangun dialog membentuk dan membentuk organisasi bersama untuk menghimpun masyarakat beda etnis, membangun dialog dan membendung berbagai provokasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *"Tantangan Multikulturalisme dalam Pembangunan"*. Materi pada Seminar dan Sarasehan Nasional VIII JKAI (Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia). Medan, 20-25 Februari 2006. Tema : Menata Kehidupan Majemuk Berbasis Multikulturalisme.
- A.,B., Shamsul, 2001, *"The Redefinition of Politics and the Transformation of Malaysian Pluralism"*, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press).
- Anderson. Stephen K., 2003, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: Rajawali Press).
- Blummer, Herbert, 1986, *Symbolik Interactionism Perspective and Method*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Embong, Abdul Rahman, 2001, *Pluralism in Postcolonial* Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism : Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press). Etzioni, Amitai, 1996, *The New Golden Rule* (New York: Basic Book).
- Geertz, Clifford, 1973, *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in*

² Bangunan tambahan semi permanen di halaman rumah keluarga yang kena musibah. Terbuat dari bahan bambu, seng atau terpal.

- the New States*", dalam bukunya *Interpretation of Cultures*, New York: Basic, h. 234-254.
- Glazer, Nathan, 1967, *We Are All Multiculturalists Now* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
- Hefner, Robert W (ed), 2007, *Politik Multikulturalisme Menggugat Realitas Kebangsaan* (Yogyakarta : Kanisius)
- Imaludin Iim, 2005. *Kehidupan Multi Etnik di Kota Padang*, International Symposium of the Journal Anthropology Indonesia, Depok.
- Lili Weri A. 2005. *Prasangka dan Konflik . Komunikasi Lintas Budaya Multikultur*. (Yogyakarta : LKiS)
- Lubis, Zulkifli. 2006 "*Eksplorasi Gagasan Menuju Pembangunan Berbasis Multikulturalisme*". Makalah pada Seminar dan Sarasehan Nasional VIII JKAI (Jaringan Keakerabatan Antropologi Indonesia), Medan, 20-25 Februari 2006, Tema : Menata Kehidupan Majemuk Berbasiskan Multikulturalisme.
- Ohoitumur Yong. 2002. "*Menuju Masyarakat Multikultural yang Berhati Nurani (Refleksi atas Realitas dan Idealisme Masyarakat)*". Pengantar diskusi pada Pendidikan Kader Kemasyarakatan se-Sulawesi tahun 2002. Tomohon : 2 Oktober 2002.
- Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Yogyakarta : Kanisius)
- Pratiknjo, Maria Heny. 2007. "*Kedudukan Wanita Manado dalam Masyarakat*". Materi pada Diseminasi Modul Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa. Manado, 30 Juli - 2 Agustus 2007.
- Pratiknjo, Maria Heny, 2009, "*Pembinaan Generasi muda Dalam Upaya Mencegah Konflik Massa Terbuka, materi Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Manado 15 Agustus 2009.*
- Saefudin, Ahmad Fedyani. 1986, "*Konflik dan Interaksi*", di dalam Rolland Robertson (Ed.) *Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta: Rajawali)